



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Daerah

The Communication Strategy of the Kutai Kartanegara Regency General Elections Commission (GEC) in Enhancing Voter Participation in Regional Elections

Achmad Roziq Maulana^{1*}, Muhammad Abzar D.², Abu Bakar Idham Madani³

¹⁻³Universitas Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

*Corresponding Author: E-mail: roziq.jokers313@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 Aug, 2025

Revised: 21 Oct, 2025

Accepted: 29 Oct, 2025

Kata Kunci:

Komisi Pemilihan Umum (KPU); Kutai Kartanegara; Partisipasi Pemilih; Strategi Komunikasi

Keywords:

Communication Strategy; General Elections Commission (GEC); Kutai Kartanegara; Voter Participation

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8979](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8979)

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah secara langsung berfungsi sebagai mekanisme politik strategis untuk mengamankan legitimasi publik dalam kerangka tata kelola lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan daerah 2024. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Informan utama meliputi pejabat dari kantor KPU, khususnya Koordinator Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, serta personel dari Divisi Pendidikan Pemilih, Keterlibatan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Validitas data dipastikan melalui teknik triangulasi. Temuan mengungkapkan bahwa strategi komunikasi KPU terdiri dari dua komponen utama: komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi organisasi melibatkan pertemuan koordinasi internal dengan pemangku kepentingan, rapat pleno dengan pimpinan KPU, dan sesi pelatihan untuk badan Adhoc tentang pendidikan pemilu, prosedur, dan implementasi. Strategi komunikasi massa mencakup penyebarluasan konten edukatif melalui podcast YouTube, siaran radio, dan media cetak serta digital, bersama dengan pembaruan aktif melalui saluran media sosial resmi KPU, dialog publik, dan acara komunitas. Strategi-strategi yang dikombinasikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik, kepercayaan, dan partisipasi dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

ABSTRACT

Direct regional head elections serve as a strategic political mechanism to secure public legitimacy within the framework of local governance. This study aims to examine the communication strategies employed by the General Elections

Commission (GEC) of Kutai Kartanegara Regency to enhance voter participation in the 2024 regional elections. A descriptive qualitative approach was utilized, with data collected through observations, in-depth interviews, and document analysis. The primary informants included officials from the GEC office, particularly the Coordinator of Public Relations and Community Participation, as well as personnel from the Voter Education, Community Engagement, and Human Resources Division. Data validity was ensured through triangulation techniques. The findings reveal that the GEC's communication strategy consisted of two main components: organizational communication and mass communication. Organizational communication involved internal coordination meetings with stakeholders, plenary sessions with GEC leadership, and training sessions for Adhoc bodies on election education, procedures, and implementation. Mass communication strategies included the dissemination of educational content via YouTube podcasts, radio broadcasts, and print and digital media, along with active updates through the GEC's official social media channels, public dialogues, and community events. These combined strategies were aimed at fostering public awareness, trust, and participation in the democratic process at the regional level.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi langkah politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan daerah. Legitimasi ini bukan sekadar soal legalitas, tapi komitmen untuk mewujudkan nilai dan norma yang mencakup dimensi hukum, moral, dan sosial. Konkretnya, kepala daerah yang legitimate itu yang dipilih melalui prosedur sesuai aturan, lewat kampanye dan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, sesuai norma sosial dan etika politik, didukung mayoritas suara pemilih secara objektif, dan menjalankan tugas sesuai janji kampanye.

Sistem pemilihan langsung oleh rakyat memang metode paling populer di negara-negara dengan sistem pemerintahan federal seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Kanada. Rakyat langsung memilih kepala daerahnya, yang otomatis memberikan legitimasi kuat pada proses maupun hasilnya. Kepala daerah punya kewenangan besar atas kekuasaannya. Gubernur bukan atasan langsung walikota atau bupati. Bersamaan dengan itu, kontrol publik dan pengawasan oleh dewan (DPRD) terhadap walikota atau gubernur juga berjalan efektif, sehingga mekanisme checks and balances benar-benar optimal.

Pemilihan kepala daerah langsung telah mengembalikan kedaulatan penuh kepada rakyat, memberdayakan mereka untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan dengan begitu lebih menjamin representasi dan demokratisasi. Namun, hasil pemilihan ini juga konsekuensi langsung dari keputusan rakyat, termasuk kalau nantinya kinerja kepala daerah mengecewakan. Makanya, kualitas pemilihan dalam sistem langsung ini sangat krusial. Kualitas pemilihan mencakup rasionalitas dalam memilih kandidat kepala daerah yang tersedia. Akuntabilitas kepala daerah diarahkan kepada rakyat melalui mekanisme politik, yang kemudian menuntut keterlibatan publik dalam proses checks and balances.

Kondisi ini menandai kemajuan historis demokrasi di Indonesia. Meski begitu, kesuksesan pemilihan kepala daerah langsung sangat ditentukan oleh rakyat sebagai pemilih. Dalam implementasinya, ada dua faktor kunci yang bisa mempengaruhi kesuksesan pilkada. Pertama, faktor pemilih, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitatif menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh dan diberi kesempatan memilih dan dipilih. Karena itu, pendaftaran pemilih harus benar-benar mutakhir. Sementara aspek kualitatif berkaitan dengan kesiapan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024. Berdasarkan DPT nasional, ada 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, terdiri dari 101.654.993 (49,91%) laki-laki dan 102.111.361 (50,9%) perempuan. Menurut rekapitulasi DPT, terdapat 52.318.841 (25,69%) pemilih Gen Z, serta 67.731.281 (33%) pemilih

milenial. Selain itu, ada 55.069.832 (27,04%) pemilih Generasi X, 25.799.756 (12,67%) baby boomers, dan 2.737.644 (1,34%) pre-boomers (Maulana, 2024).

Mereka yang lahir antara 1980 dan 1994 dikenal sebagai generasi milenial. Sementara itu, ada 46.800.161 pemilih Gen Z, atau 22,85% dari total DPT Pilkada 2024. Individu yang lahir antara 1995 dan 2000 disebut "Gen Z". Lebih dari 113 juta orang masuk dalam demografi milenial dan Gen Z. Merepresentasikan 58,69% dari total pemilih terdaftar dalam DPT, kedua generasi ini jelas merupakan kelompok terbesar yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024. Kelompok pemilih lainnya, yang terdiri dari 55.069.832 individu atau 27,04% dari total pemilih, termasuk Generasi X. Mereka yang lahir antara 1965 dan 1979 dikenal sebagai Generasi X. Sisanya, 2.737.644 pemilih atau 1,34% dari total, adalah anggota generasi pre-boomer, yakni mereka yang lahir sebelum 1944.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri telah merilis hasil Berita Acara Rekapitulasi DPT tingkat kabupaten untuk Kutai Kartanegara. Dengan 287.725 pemilih laki-laki dan 264.744 pemilih perempuan, total jumlah pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam DPT Pilkada 2024 adalah 552.469 pemilih (<https://kab-kutaikartanegara.kpu.go.id/>).

Sebagai dampak dari pengaruh KPU terhadap pemilih yang memenuhi syarat, akan ada peningkatan jumlah orang yang memberikan suara dalam pemilihan daerah 2024. Kita saat ini berada di tengah Revolusi Industri 4.0 yang telah bertransisi ke Industri 5.0, dan pergeseran ini pasti akan mempengaruhi partisipasi pemilih. Ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung perspektif pemilih. Di satu sisi, informasi yang beredar punya kekuatan untuk mempengaruhi pemilih. Di sisi lain, pemilih yang tidak mengikuti perkembangan politik bisa terpengaruh oleh kepentingan politik yang tidak jelas, yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi Indonesia. Riset dari Lembaga Media Indonesia menunjukkan bahwa banyak anggota masyarakat tidak tertarik pada politik karena faktor-faktor seperti politik yang dianggap membosankan dan elit politik yang terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok. Temuan penelitian awal juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan daerah 2024. Perlu dicatat bahwa dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara sebelumnya pada tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih hanya 56,67%, yang tentunya menjadi bahan evaluasi dalam tahapan pemilihan 2024.

Partisipasi secara harfiah dipahami sebagai mengambil bagian atau keterlibatan. Menurut Adams, partisipasi sangat penting untuk pengembangan pribadi dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik dan mampu membedakan antara masalah pribadi dan masalah masyarakat.

Salah satu aspek penting demokrasi adalah partisipasi, yang membentuk prinsip dasar demokrasi. Partisipasi mengacu pada bagaimana masyarakat secara mandiri mengenali hal-hal yang penting dan dibutuhkan untuk diri mereka sendiri dan masyarakat yang lebih luas, yang diharapkan dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara-cara yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Dengan demikian, warga negara punya hak untuk berpartisipasi dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik didefinisikan sebagai keterlibatan warga biasa dalam membuat semua keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan mereka (Madani, 2023).

Dalam ilmu politik, partisipasi didefinisikan sebagai upaya anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. Sementara itu, definisi umum partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, baik dengan langsung memilih pemimpin nasional maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Ini mencakup aktivitas seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan publik, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, menghubungi pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (Budiardjo, 2008).

Partisipasi politik merupakan komponen esensial dari kehidupan politik suatu negara, khususnya bagi negara-negara yang mengidentifikasi diri sebagai demokrasi, di mana ia berfungsi sebagai salah satu indikator utamanya. Dengan kata lain, suatu negara hanya bisa dianggap demokratis jika

pemerintah yang berkuasa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sebaliknya, warga negara yang relevan juga harus menunjukkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, tingkat demokrasi di negara tersebut tetap dipertanyakan. Oleh karena itu, isu partisipasi politik bukan hanya soal sifat atau karakter pemerintah, tapi lebih berkaitan erat dengan sifat dan karakter masyarakat di suatu negara dan pengaruh yang dihasilkannya (Kamarudin, 2011). Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk-bentuk aktivitas dan efektivitas upaya komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif seperti ini, peneliti berperan krusial dalam menilai kondisi dunia nyata. Metode triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam analisis deskriptif-kualitatif. Hal ini terjadi selama proses analisis data induktif (kualitatif). Lokasi penelitian adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara. Subjek penelitian meliputi Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, serta Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, yang berfungsi sebagai informan utama. Untuk keperluan triangulasi, peneliti memanfaatkan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta staf dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Wawancara, observasi partisipan, dan catatan tertulis merupakan beberapa metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memperoleh informasi. Dalam menganalisis data penelitian, studi ini mengadopsi perspektif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengamati aktivitas yang dilakukan dalam program peningkatan partisipasi masyarakat yang diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Melakukan wawancara dengan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta staf dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
3. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewawancarai informan penelitian.
4. Membaca dan menginterpretasi pernyataan yang dibuat oleh komisioner, mencari definisi dan postulat terkait yang selaras dengan tepat. Selanjutnya, mencatat hal-hal urgen yang relevan dengan konsep kunci yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pernyataan, definisi, elemen terkait, dan sebagainya.
5. Setelah mengumpulkan data, peneliti mengorganisir catatan wawancara ke dalam kategori yang sesuai. Ketika kesamaan atau kemiripan teridentifikasi, peneliti menempatkannya ke dalam kategori spesifik.
6. Langkah berikutnya melibatkan kategorisasi materi yang telah disusun dan menghubungkannya dengan kategori lain. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah susunan yang sistematis dan keterkaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
7. Untuk memverifikasi relevansi data, peneliti memeriksa struktur dan sistematikasi pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.

8. Kelengkapan data dicapai dengan meninjau konten dalam data yang ada, termasuk data observasi, data wawancara, dan data dokumentasi.
9. Langkah selanjutnya memperlakukan respons informan sebagai hasil pemeriksaan data dan kemudian memasukkannya sebagai jawaban setelah proses analisis.
10. Tahap akhir melibatkan penulisan laporan penelitian. Setelah peneliti secara komprehensif mendeskripsikan respons informan, langkah ini secara sistematis mengintegrasikannya ke dalam laporan penelitian.

HASIL

Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkantor pusat di ibu kota Republik Indonesia, KPU provinsi berada di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berada di ibu kota kabupaten atau kota yang bersangkutan. KPU nasional terdiri dari 7 (tujuh) anggota, KPU provinsi terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) anggota, dan KPU kabupaten/kota memiliki 5 (lima) anggota. Penetapan jumlah anggota di KPU provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada kriteria seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah pemerintahan administratif.

Keanggotaan KPU di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mencakup seorang ketua yang juga berfungsi sebagai anggota, bersama dengan anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan memastikan setidaknya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Masa keanggotaan adalah 5 (lima) tahun, dimulai dari pengambilan sumpah atau janji, dan anggota dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sementara KPU provinsi dan kabupaten/kota didukung oleh sekretariat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sementara itu, sekretariat provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara didirikan pada bulan Maret 2003, dengan alamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (bekas gedung BP7). Lembaga ini dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama Indonesia pada tahun 2005. Dalam menjalankan tugasnya, komisioner KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

Periode Kepemimpinan Pertama KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (2003):

1. Ketua: Bapak Rifat Sulaiman
2. Anggota: Ibu Arief Endang Sri Wahyuni
3. Anggota: Ibu Rinda Destyanti
4. Anggota: Muchtar Zainuddin
5. Anggota: Ishak Iskandar
6. Sekretaris: Muhammad Junaidi

Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berlokasi di Jalan Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511,

dengan koordinat geografis -0.45066871126471336 lintang dan 117.00087985722789 bujur, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Lokasi Geografis Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi dan Misi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjadi penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Misi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu agar efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- 2). Memperkuat integritas, independensi, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan memperkuat kode etik penyelenggara pemilu;
- 3). Mengembangkan regulasi pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4). Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk semua pemilih kepentingan;
- 5). Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, karena pemilih yang berdaulat membangun bangsa yang kuat; dan
- 6). Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Strategi Komunikasi untuk Pemilihan Kepala Daerah

Strategi komunikasi merepresentasikan kombinasi optimal dari semua elemen komunikasi—dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, hingga pengaruh (efek)—yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam proses komunikasi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Keberhasilan atau kegagalan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap semua elemen masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal ini karena strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pemilih dan meningkatkan kuantitas pemilih, sehingga mencapai

tujuan demokrasi.

Sejalan dengan masalah penelitian mengenai strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, strategi yang digunakan mencakup Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Massa. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara individu dalam suatu organisasi, mencakup semua bentuk interaksi—verbal dan nonverbal—di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi komunikasi organisasi di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara diwujudkan melalui beberapa kegiatan formal, seperti menyelenggarakan pertemuan internal yang melibatkan pimpinan KPU dan pemangku kepentingan terkait. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan, tahapan, dan kegiatan yang direncanakan. Selain pertemuan internal, rapat pleno diadakan untuk membuat keputusan tentang kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pimpinan KPU. Pendidikan juga merupakan komponen dari komunikasi organisasi, seperti menyampaikan materi pendidikan tentang pemilu, termasuk prosedur yang harus dikuasai oleh badan Adhoc KPU, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Untuk menggambarkan kebijakan strategi komunikasi dalam bentuk komunikasi organisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti melakukan wawancara mengenai kebijakan strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kami diwajibkan untuk terlebih dahulu memperkuat kualitas dan kapasitas internal kami. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kami membentuk badan Adhoc untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat kelurahan atau desa yang disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di tingkat yang lebih rendah seperti rukun tetangga (RT) atau RT gabungan, yang biasa disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)."

Dari kutipan wawancara tersebut, jelas bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menjalankan salah satu program kerjanya—meningkatkan partisipasi pemilih—tidak langsung terjun ke masyarakat sebagai pemegang hak pilih, tetapi terlebih dahulu memperkuat kapasitas internal. Ini bukan tanpa alasan. Melanjutkan dari kutipan wawancara, peneliti menanyakan tentang fungsi penguatan kualitas dan kapasitas badan Adhoc, sebagai berikut:

"Fungsi penguatan kapasitas dan kualitas badan Adhoc adalah untuk memastikan bahwa proses penyebaran informasi terkait pemilihan kepala daerah berjalan secara masif. Kami menyadari bahwa jika hanya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang beroperasi tanpa bantuan Adhoc, akan mustahil untuk mencapai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara. Strategi kami untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka adalah melalui bimbingan teknis. Kami melakukan ini karena badan Adhoc adalah garis depan kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai tahapan dan teknis pemilu, sehingga sangat membantu kami dalam meningkatkan partisipasi pemilih."

Melanjutkan dari tujuan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kualitas badan Adhoc di atas, ini karena badan Adhoc adalah bagian dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan bahkan tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, pembangunan kapasitas sangat penting untuk lebih memaksimalkan partisipasi masyarakat. Di satu sisi, badan Adhoc adalah panitia pemilu yang langsung berinteraksi dengan

masyarakat, sehingga memudahkan untuk mensosialisasikan apa pun yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Melalui bimbingan teknis yang terstruktur dari PPK hingga tingkat yang lebih rendah atau KPPS, diharapkan penyelenggara Adhoc akan memahami secara menyeluruh teknis pemilu, sehingga memfasilitasi penjelasan yang lebih mudah kepada masyarakat di sekitar mereka.

Tercatat ada 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan setiap kecamatan memiliki 5 anggota PPK, dengan total 100 anggota PPK yang tersebar di semua kecamatan. Selain tingkat kecamatan, badan Adhoc ada di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kutai Kartanegara, ada 237 kelurahan dan desa di kabupaten tersebut, dengan 3 anggota PPS per kelurahan/desa, dengan total 711 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh kelurahan/desa kabupaten. Tingkat Adhoc terakhir adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Merujuk pada sumber data dari berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 1.447 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh kabupaten, dengan 7 anggota KPPS per TPS, dengan total 10.129 anggota KPPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS. Ini lebih memaksimalkan tugas KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan pemaparan dari Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, peneliti juga mewawancara Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pembentukan badan Adhoc untuk membantu operasi KPU dan sebagai pilar dalam meningkatkan partisipasi hak pilih. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Dengan adanya badan Adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, kami sangat terbantu. Ini karena badan Adhoc adalah garis depan demokrasi di masyarakat. Jika masyarakat bingung tentang mekanisme atau hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada, mereka dapat bertanya kepada badan Adhoc. Selain itu, kami membekali mereka dengan pengetahuan tentang teknis pemilu, serta memberikan honorarium dan dana operasional untuk mendukung kegiatan mereka. Ini sangat membantu untuk proses ke depan. Selain itu, di beberapa lokasi, kami mengalokasikan anggaran khusus untuk PPK untuk menyelenggarakan acara yang mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah."

Deskripsi hasil wawancara menunjukkan pentingnya badan Adhoc dalam memaksimalkan peran penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menggunakan hak pilih selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, setiap penyelenggara di bawah KPU telah dilengkapi dengan pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme pemilu, sehingga diharapkan pengetahuan ini akan disebarluaskan kepada masyarakat atau pemegang hak pilih, mengingat bahwa badan Adhoc langsung berinteraksi dengan masyarakat luas. Tidak hanya itu, anggaran juga dialokasikan untuk memaksimalkan peran badan Adhoc, seperti dana operasional, honorarium, dan kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan. Kegiatan yang dilakukan diharapkan langsung berdampak pada masyarakat dengan fokus pada tema pemilihan kepala daerah, memastikan bahwa masyarakat tahu dan menggunakan hak pilih mereka.

Terkait hal ini, peneliti mencari informasi tentang komunikasi organisasi di luar pembentukan dan penguatan kapasitas badan Adhoc untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memaksimalkan peran di masyarakat. Peneliti juga mewawancara komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi tentang komunikasi kelembagaan internal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memaksimalkan peran KPU dalam layanan. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Selain memperkuat sumber daya manusia ke bawah, seperti PPK, PPS, dan KPPS, sebelum mengimplementasikan itu, kami tentu melakukan diskusi mendalam tentang teknis dan implementasi Pilkada dengan pemangku kepentingan di KPU Kukar untuk memastikan tidak ada informasi yang salah diberikan kepada masyarakat. Jadi, sebelum mengedukasi masyarakat, kami terlebih dahulu menyelesaikannya secara internal di KPU Kukar."

Mengingat pentingnya kualitas sumber daya manusia internal, KPU menyadari bahwa langkah utama adalah memaksimalkan tugas dan fungsi setiap pemangku kepentingan internal terlebih dahulu, sehingga outputnya akan optimal untuk dampak masyarakat. Selain komunikasi organisasi, peneliti menganggap perlu untuk menggali lebih dalam tentang komunikasi massa KPU Kutai Kartanegara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peneliti mewawancara pimpinan KPU Kutai Kartanegara mengenai komunikasi massa yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator (organisasi) kepada audiens yang luas, heterogen, anonim, dan tersebar melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet, secara bersamaan. Proses ini memungkinkan pesan yang sama untuk menjangkau banyak orang di berbagai lokasi sekaligus, bertujuan untuk menyebarkan informasi, hiburan, dan mempengaruhi opini publik. Untuk memahami strategi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, serta hambatan dan faktor pendukung, peneliti mewawancara Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, dengan hasil sebagai berikut:

"Komunikasi massa yang kami terapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pertama kali dibahas dalam forum internal tentang apa yang akan diimplementasikan sebagai salah satu prioritas dan tujuan organisasi ini. Kami tidak buta terhadap perkembangan teknologi saat ini; kami terus memaksimalkan media sosial kami untuk menyebarkan informasi terkait Pilkada. Di satu sisi, kami juga mempertimbangkan hambatan lain, yaitu medan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa strategi yang diterapkan di satu wilayah tidak dapat seragam dengan wilayah lain. Misalnya, strategi di Jawa akan sangat berbeda jika diterapkan di Kalimantan, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wilayahnya yang luas dan beberapa wilayah yang cukup sulit diakses. Dengan demikian, kami perlu meninjau hal-hal yang akan diterapkan sehingga program kami tepat sasaran. Selain itu, akses internet yang lemah di beberapa daerah menjadi tantangan untuk menemukan alternatif sehingga proses pendidikan terus berlanjut."

Sebelum mengimplementasikan kegiatan untuk mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terlebih dahulu merancang prinsip dan rencana yang akan diterapkan, memastikan strategi tepat sasaran. Penggunaan teknologi informasi yang tersedia untuk lebih mudah dan luas menjangkau masyarakat juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sisi lain, mengingat luas wilayah kabupaten yang mencapai 27.263 km² dan distribusi populasi, hal ini menjadi tantangan unik bagi KPU, bersama dengan beberapa lokasi yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang tidak memadai dan jaringan internet yang lemah di beberapa kecamatan.

Dari proses perencanaan strategi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, bersama dengan tantangan yang dihadapi, output untuk menerapkan kegiatan-kegiatan ini berkumpul pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk memaksimalkan program peningkatan partisipasi masyarakat, selain memperkuat

sumber daya manusia internal KPU dan kapasitas badan Adhoc dari tingkat PPK, PPS hingga KPPS, kami juga diwajibkan untuk menyebarkan informasi melalui saluran YouTube, media sosial kami seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, serta website KPU Kukar. Kami memaksimalkan semuanya untuk menyebarkan informasi dan tahapan pemilu. Kami juga memberikan pendidikan pemilu yang lebih kreatif, seperti berkolaborasi dengan media podcast di saluran YouTube, siaran radio lokal, dan stasiun televisi. Kegiatan lain seperti dialog dan festival masyarakat juga dilakukan, bertujuan agar informasi terkait pemilu diterima secara akurat. Selain itu, kami tidak bisa hanya fokus pada penyebaran informasi melalui media sosial; kami sering melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pengurus partai politik, dan lembaga terkait. Sosialisasi tidak terpusat hanya di kecamatan dekat kantor KPU tetapi tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kami diskusikan mencakup pemilihan kepala daerah: kapan Pilkada diadakan, mekanismenya, apa yang diperbolehkan dan dilarang, dan sebagainya. Bentuk kegiatan sosialisasi beragam, mulai dari bazar, hiburan masyarakat, jalan sehat, dan zumba."

Dari pemaparan di atas, beberapa strategi komunikasi diterapkan untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif menjangkau masyarakat. Selain memperkuat kapasitas penyelenggara tingkat bawah—yaitu PPK, PPS, dan KPPS di seluruh kabupaten—KPU mengikuti perkembangan media online saat ini, seperti Instagram, Facebook, dan saluran YouTube KPU Kutai Kartanegara. Mereka juga berkolaborasi dengan siaran radio lokal untuk mengedukasi masyarakat, melakukan podcast di saluran YouTube, dan memanfaatkan stasiun televisi. Selain penyebaran informasi melalui media yang disebutkan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan berbagai kegiatan sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah, mencakup tahapan yang sedang berlangsung, dasar hukum pemilu, waktu pemilu, kandidat yang ditentukan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, prosedur pemungutan suara di TPS, tindakan yang diizinkan, dan larangan selama tahapan pemilu.

Elemen masyarakat yang ditargetkan sebagai audiens untuk kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah beragam, termasuk pengurus organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, pengurus partai politik, dan lembaga terkait. Untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, KPU Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan festival masyarakat seperti bazar, panggung hiburan, jalan sehat, dan zumba.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga memberikan kesempatan kepada badan Adhoc untuk mengedukasi masyarakat di tingkat mereka untuk memastikan waktu yang tersedia selama tahapan berjalan lebih efisien, seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara:

"Sosialisasi ini bukan hanya tugas KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tugas kita semua sebagai penyelenggara pemilu. Di satu sisi, jika hanya kami yang melakukan sosialisasi, waktu yang singkat dan tahapan pemilu tentu tidak akan efisien, dan penyebaran informasi tidak akan masif. Jadi, kami membutuhkan rekan-rekan Adhoc untuk membantu dalam sosialisasi. Oleh karena itu, kami meminta badan Adhoc untuk juga melakukan sosialisasi di tingkat mereka, dan kami telah menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi di setiap tingkat. Mengenai bentuk sosialisasi, kami serahkan kepada mereka; biasanya, itu dikemas dalam kegiatan seperti jalan sehat, zumba, atau membuka stan di acara pemerintah atau swasta selama tahapan, atau mengundang tokoh masyarakat

di tingkat masing-masing."

Dari pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dijelaskan sebagai bentuk penyebaran informasi dan pendidikan masyarakat agar lebih masif dan efisien. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memberdayakan badan Adhoc untuk juga melakukan sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah di tingkat mereka untuk memaksimalkan penyebaran informasi, dengan harapan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah tahapan pemilu yang sangat singkat yang tumpang tindih dengan persiapan lain menjelang hari pemungutan suara. Bentuk sosialisasi yang diimplementasikan beragam, dari jalan sehat, zumba, atau berkolaborasi dengan lembaga pemerintah daerah, serta mengundang tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada.

Sejalan dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti mewawancara salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tenggarong, yang menyebutkan beberapa hal terkait kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tenggarong mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Beberapa kegiatan dari PPK Kecamatan Tenggarong selama tahapan Pilkada, terutama sosialisasi, telah mengimplementasikan beberapa acara seperti sosialisasi pendidikan pemilih yang telah kami lakukan beberapa kali. Kegiatan sosialisasi menargetkan beberapa organisasi, mulai dari organisasi masyarakat di Kecamatan Tenggarong, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat. Materi yang kami sampaikan mencakup tahapan dan jadwal Pilkada, kandidat, waktu, dan larangan selama tahapan hingga hari pemilu. Selain itu, kami mengadakan acara nonton bareng tim sepak bola nasional Indonesia karena ada jadwal pertandingan saat itu; kami menjadwalkan nonton bareng dan menyiapkan materi Pilkada. Terakhir, kami melakukan senam bersama atau zumba untuk Pilkada yang damai bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Tenggarong. Kami juga secara intensif menggunakan media sosial."

Salah satu penyelenggara Adhoc yang diwawancara oleh peneliti adalah Panitia Pemilihan Kecamatan Tenggarong, dari mana hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa kegiatan telah dilakukan untuk sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di Kecamatan Tenggarong. Strategi PPK untuk meningkatkan partisipasi pemilih mencakup mengaktifkan akun media sosial PPK untuk mengedukasi masyarakat secara online. Selain itu, mereka melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat, yaitu organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat.

DISKUSI

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa aspek kunci muncul sebagai fokus diskusi mengenai peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pertama, struktur dan organisasi KPU di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah anggota dan masa jabatan yang diatur secara ketat berdasarkan kriteria demografis dan administratif. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menekankan pentingnya representasi dan profesionalisme dalam badan penyelenggara pemilu (Aspinall & Mietzner, 2010).

Visi dan misi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk menjadi penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas yang bertujuan mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Misi tersebut mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, peningkatan integritas penyelenggara, perumusan regulasi yang partisipatif, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, yang semuanya merupakan fondasi

esensial demokrasi modern (Hadiz, 2010).

Strategi komunikasi organisasi menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama melalui penguatan kapasitas badan Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang berfungsi sebagai garis depan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih dari tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip komunikasi organisasi yang efektif, di mana interaksi internal yang terstruktur mendukung pencapaian tujuan bersama, seperti yang dijelaskan oleh Robbins & Judge (2017) dan Putnam (2000).

Lebih lanjut, pemanfaatan media massa dan media sosial oleh KPU Kutai Kartanegara, termasuk platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, podcast, radio, dan televisi, menunjukkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi komunikasi modern. Strategi ini memungkinkan penyebaran informasi yang luas dan kreatif, sejalan dengan konsep sistem media hybrid yang diusulkan oleh Chadwick (2013) dan Vaccari (2013).

KESIMPULAN

KPU Kutai Kartanegara menerapkan strategi komunikasi komprehensif yang menggabungkan komunikasi organisasi dan komunikasi massa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Penguatan kapasitas internal, pemberdayaan badan Adhoc di semua tingkat administratif, pemanfaatan beragam saluran media, dan keterlibatan masyarakat melalui acara-acara kreatif merupakan komponen kunci dari strategi ini. Meskipun menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh geografi dan infrastruktur, pendekatan multi-faceted KPU bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pemilu menjangkau semua pemilih yang memenuhi syarat secara efektif, sehingga mendukung partisipasi demokratis di wilayah tersebut.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dalam konteks keabsahan temuan dan interpretasi hasil. Cakupan geografis yang terfokus pada Kabupaten Kutai Kartanegara dengan karakteristik demografi, infrastruktur, dan konteks sosial-politik yang spesifik membatasi generalisasi temuan ke daerah lain di Indonesia. Perbedaan aksesibilitas wilayah, tingkat literasi digital masyarakat, serta variasi platform komunikasi yang dominan di daerah lain dapat menghasilkan pola partisipasi pemilih yang berbeda.

Pendekatan kualitatif yang dipilih memberikan pemahaman mendalam tentang strategi komunikasi KPU, namun memiliki keterbatasan dalam mengukur efektivitas strategi secara kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik yang memadai untuk mengukur korelasi langsung antara implementasi strategi komunikasi dengan tingkat partisipasi pemilih secara numerik. Untuk penelitian selanjutnya, kombinasi metode mixed-method dengan survei skala besar dapat memperkuat validitas temuan.

Pemilihan informan penelitian yang sebagian besar berasal dari internal KPU dan badan Adhoc dapat menimbulkan bias perspektif. Perspektif pemilih sebagai target utama strategi komunikasi belum terwakili secara memadai dalam penelitian ini. Pandangan dan pengalaman langsung masyarakat pemilih—terutama dari kelompok dengan tingkat partisipasi rendah atau yang berada di wilayah sulit dijangkau—dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas strategi yang diterapkan. Keterbatasan ini bukan merupakan kesalahan metodologis, melainkan pilihan fokus penelitian yang memprioritaskan pemahaman strategi dari perspektif penyelenggara.

Periode penelitian yang terbatas pada tahapan menjelang dan selama Pilkada 2024 tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis dampak jangka panjang dari strategi komunikasi yang diterapkan. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi secara mendalam pengaruh faktor eksternal di luar kendali KPU yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, seperti dinamika politik lokal,

popularitas kandidat, atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi, namun berada di luar fokus penelitian tentang strategi komunikasi KPU.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai kontribusi penelitian dalam memahami upaya KPU Kutai Kartanegara, namun membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang dapat melengkapi temuan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan perspektif pemilih secara lebih luas, dan melakukan analisis komparatif lintas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chadwick, Andrew. 2013. *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Coleman, Stephen. 2004. "Party Members and Activists: A Framework for Analysis." *Party Politics*.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hefni, Herjani. 2017. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamarudin, Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Littlejohn, Stephen W. 2009. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*, 9th ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- Madani, Abubakar. 2023. *Konsep Elite Politik: Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, 1st ed. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2017. *Organizational Behavior*. Boston: Pearson.
- Rush, Michael, and Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Edi, and Mite Setiansah. 2010. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Muhammad, and Sri Rayhaniah. 2022. "Implementation of the Principles of Islamic Communication in the Digital Era." *Borneo International Journal of Islamic Studies (BIJIS)*.
- Tubbs, Stewart L., and Sylvia Moss. 2008. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Vaccari, Cristian. 2013. *Digital Politics in Western Democracies: A Comparative Study*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Wijaya, Ida Suryani. 2013. "Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi dalam Organisasi." *Jurnal Dakwah Tabligh*.

"Kesbangpol Kukar Akui Tingkat Partisipasi Pemilih Masih Rendah." *Media Kartanegara*.

<https://mediakartanegara.com/daerah/kutai-kartanegara/kesbangpol-kukar-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-masih-rendah/>.

“Kurangnya Minat Anak Muda dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/roberthyung/63f80d6b4addee6ba65283e2/kurangnya-minat-anak-muda-dalam-pemilihan-kepala-daerah>.